

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, A. 2022. Kebijakan Hukum Agraria dalam Perkembangan Pembentukan Hukum Tanah Nasional di Indonesia. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Absi, W. Z. dkk. 2022. Hukum Adat. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Amarrohman, F. J. dan Onang F. W. 2021. *Hukum Agraria*. Semarang: Undip Press.
- Angkasa, N. dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Cv. Laduny Alifatma (Penerbit Laduny).
- Aprilianti Kasmawati. 2022. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Arba. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Bukido, R. 2017. Hukum Adat. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Efendi, J. dkk. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media
- Fajar, M. dan Y Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzy, A. 2019. *Metode Sampling*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hikmawati, F. 2020. *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Isnaini. dan Aggreini A. L. 2022. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Madean: CV. Pustaka Prima
- Jabar, A. 2020. Pengantar Hukum Agraria di Indonesia. Surabaya: Pena Salsabila
- Mangku, D. G. S. 2020. Pengantar Ilmu Hukum, Jawa Tengah: Penerbit Lekeisha.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram Univeristy Press.
- Palenewen, J. Y. 2022. Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jawa Barat: Widina Media Utama
- Pide, A. S. M. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ramadhani, R. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Santoso, U. 2014. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sitorus, O. 2014. *Modul Hukum Tanah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Soetoto, E. H. Dkk. 2021. *Buku Ajaran Hukum Adat*. Malang: Madsa Media.

- Solikin, H. Nur. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suyanto, H. 2019. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya
- Tiara, A. 2022. *Pengantar Hukum Agraria Indonesia*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Warjiyanti. S. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish
- Yazid, F. 2020. *Pengantar Hukum Agraria*. Sumatera Utara: Undhar Press.
- Zumrohkhantum, S. Darda, S. 2014. *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas

Jurnal

- Adnyani, N. K. S, dan Dantes, N. K. F. D. 2022. “Pemberdayaan Desa Adat dalam Pembangunan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Komunitas Krama”. *Jurnal Widya Laksana*. Volume 11, Nomor 1 (hlm. 61-75).
- Adnyani, N. K. S. 2021. “Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Agraria”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 9, Nomor 2 (hlm 464-473)
- Akbar, I., dkk. 2022. “Pengakuan dan Pengetahuan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima”. *Jurnal Education and Depelopment*. Volume 10, Nomor 1 (hlm. 526-534).
- Anugrahnu, D. 2023. “Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat (Hak Masyarakat Adat Dayak dengan Menetapkan Lewu Sebagai Desa Adat)”. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Volume 18, Nomor 1 (hlm. 23-38).
- Arisaputra, M. I, Sri W. A. M. 2019. “Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia:Studi Komparatif. *Amanna Gappa*. Volume 27, Nomor 2 (hlm.67-87)
- Benuf, K. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7, Nomor 1 (hlm. 20-33).
- Busroh, F. F. 2017. “Mediasi Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat di Indonesia”. *Lex Jurnalica*. Volume 14, Nomor 1 (hlm. 1-10).
- Cahyaningrum, D. 2022. “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi”. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Volume 13, Nomor 1 (hlm. 41-59).
- Dana, I. P. D, dkk. 2021. “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura di Bali (Inkonsistensi Norma dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 1 Peraturan

Pemerintah No. 38 Tahun 1963)". *Jurnal Komunitas Yustisia*. Volume 4, Nomor 2 (hlm.427-439).

- Dantes, K. F, I Gusti A. A. H. 2021. "Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 7, Nomor 1 (hlm.489-494)
- Gayo, A. A. 2016. "Perlindungan Hukum Atas Tana Adat (Studi Kasus di Provensi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 18, Nomor 3 (hlm. 289-304)
- Hariato, W. 2021. "Eksistensi Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Masyarakat Adat Kebatinan Muara Sakral Kabupaten Pelalawan)". *Eksekusi*. Volume 3, Nomor 1 (hlm. 62-81).
- Hartana, N. K. S. 2020. "Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 8, Nomor 3. (hlm. 219-229).
- Hayati, N. 2016. "Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional). *Lex Jurnalica*. Volume 13, Nomor 3 (hlm. 278-289)
- Ibrahim, E. 2020. "Peranan Penghulu Terhadap Hak Ulayat di Minangkabau". *Jch: Jurnal Cendikia Hukum*. Volume 6, Nomor 1 (hlm. 161-171).
- Jonaidi. 2018. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat". *Lex Et Societatis*. Volume 6, Nomor 1 (hlm. 97-106)
- Korompis, S. A. 2018. "Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997". *Lex Privatum*. Volume 6, Nomor 1 (hlm. 20-26).
- Maheswara, Y., I Nengah A. 2021. "Modul Pluralisme Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura di Kota Denpasar". *Vidya Wertta*. Volume 4, Nomor 2 (hlm. 36-48).
- Mahniasari, I. 2013. "Pendaftaran Tanah Adat". *AL-Adl: Jurnal Hukum*. Volume 5 Nomor 9 (hlm. 22-31).
- Mayasari, I. D. A. D, Dwa Gde Rudy. 2021. "Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali". *Kertha Wicaksana*. Volume 15, Nomor 2 (hlm. 90-98)
- Mubarak, A. Z, Heni S. 2021. "Analisis Pengaruh Jalan Bypass Mataram-Gurung Terhadap Nilai Tanah di Lombok Barat". *Journal of Law, Administration, and Social Science*. Volume 1, Nomor 1 (hlm. 40-46)
- Oktaviani, A. dan Harjono. 2019. "Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan (Studi Kasus Putusan

- Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)". *Jurnal Verstek*. Volume 7, Nomor 1 (hlm. 41-46).
- Permatasari, E. dkk. 2018. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan". *Varia Justicia*. Volume 14, Nomor 1 (hlm. 1-9).
- Purnama, D. G. A. S. Y, dan A. A Istri A. A. D. 2019. "Desa Adat dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah". *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 4, Nomor 2 (hlm. 343-354).
- Puspadewi, A. A. A. I. 2022. "Pensertifikatan Tanah Adat di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal". *International Confrence Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*. Volume 1, Nomor 1 (hlm. 12-21).
- Putra, A. A. 2023. "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali". *Ijolares: Indonesia Journal of Law Research*. Volume 1, Nomor 1 (hlm. 16-22).
- Regina, dan Hanif T. 2019. "Analisis Eksistensi Tanah Ayahan Desa Adat di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Studi Kasus: Desa Tusan, Kecamatan Banjar kangin, Kabupaten Klungkung, Bali)". *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 2, Nomor 2 (hlm. 47-72).
- Rosmidah. 2014. "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2, Nomor 4 (hlm. 92-110).
- Safiuddin, S. 2018. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Volume 30, Nomor 1 (hlm. 63-77).
- Saleo, A. 2014. "Pengakuan Masyarakat Adat Tentang Hak Ulayat". *Lex Privatum*. Volume 2, Nomor 1 (hlm. 88-97).
- Sigiro, L. H. 2016. "Analisis Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Yang Menjadi Hak Perorangan Pada Tahun Ulayat Di Kabupaten Dairi". *Jurnal Article: Premise Law Journal*. Volume 17 (hlm. 1-16).
- Subandi, P. 2017. "Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945". *Yure Humano: Law Faculty of MPU Tantular University*. Volume 1, Nomor 2 (hlm. 38-56)
- Sulisrudanti, N. 2014. "Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 4, Nomor 2 (hlm. 28-43)
- Surya, I P. A., dkk. 2020. "Penyelesaian Sengketa Tanah Perkarangan Desa di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Volume 1, Nomor 2 (hlm. 78-83).

- Suwitra. 2020. "Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali". *Wicaksana, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. Volume 4 Nomor 1 (hlm. 31-44).
- Tanuramba, R. R. 2019. "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria". *Lex Privatum*. Volume 7, Nomor 5 (hlm. 25-33).
- Utama, P. A. B., dkk. 2021. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dihadapan PPAT". *Jurnal Preferensi Hukum*. Volume 2, Nomor 1 (hlm. 177-181)
- Utomo, S. 2019. "Penguatan Pasal 33 ayat (3) Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Majelis*. Volume 9 (hlm. 51-70).
- Wangi, N. K. P. S, dkk. 2023. "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Volume 3, Nomor 3 (hlm. 112-121)
- Windari, R. A. 2010. "Dilema Hukum Pensertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Pengelipuran)". *Jurnal Ika*. Volume 8, Nomor 2 (hlm. 205-216).
- Witari, R., Widya P. dan Yudiantini. 2020. "Variasi Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Dalem di Desa Adat Kesiman, Denpasar". *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Volume 35, Nomor 1 (hlm. 117-126).
- Yunus, A. dan Ahmad A. M. 2019. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim". *Jurnal Kertha Patrika*. Volume 41, Nomor 3 (hlm. 206-221).

Skripsi

- Arsadi, I. P. P. S. 2018. *Peran Desa Pakraman dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat (Studi Kasus di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha
- Putra, P. A. C. 2019. *Sengketa Tanah Terhadap Tanah Pura Paibuan Pula Sari Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104, 1960, Tambahan Lembaran Negara No. 2043)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara No. 165, 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3886)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7, 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, 1963, Tambahan Lembaran Negara No. 2555)

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara 1996)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengellaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara No. 28, 2021, Tambahan Lembaran Negara No. 6630)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara No. 59, 1997)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali 2019 No. 4: 33 hlm. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali No. 4: 16 hlm.

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/556/DJA/1986 mengenai Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan.

